

**KAJIAN DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP
KESENJANGAN EKONOMI ANTAR DAERAH PESISIR DI
PROVINSI BENGKULU**

*The Impact Of Regional Divisions To Economic Disparity Among
Coastal Regions In Bengkulu Province*

Nyayu Neti Arianti dan Indra Cahyadinata
*Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu
e-mail*

ABSTRACT

This research were conducted to analyze the impact of regional division to the economic disparity among the coastal regions in Bengkulu Province. The data used in this research were time series data of GRDP and population for the period of 1993 to 2000 (before division) and 2004 to 2011 (after division) obtained from Statistic Office. The result of this research showed that the value of Index Williamson(IW) before regional division was 0,22 lower than the IW value after the regional division (0,43). That was meaned that after the regional division, economic disparity of the coastal region in Bengkulu Province higher than before the regional division.

Keywords : *regional divisions, economic disparity, coastal region*

PENDAHULUAN

Provinsi Bengkulu berada di bagian barat Pulau Sumatera dengan luas 19.813 km². Letaknya memanjang sejauh 567 km, dari perbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara di bagian Utara, dan perbatasan dengan Provinsi Lampung di bagian Selatan. Batas bagian barat wilayah Provinsi Bengkulu adalah Samudera Indonesia dengan garis pantai sepanjang 525 km. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia, maka sebagian besar wilayah Provinsi Bengkulu adalah wilayah pesisir, dengan demikian sebagian besar penduduknya tinggal di wilayah pesisir tersebut. Wilayah pesisir mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional maupun daerah.

Provinsi Bengkulu dibentuk berdasarkan UU No. 9 tahun 1967 yang terdiri dari empat Daerah Tingkat II, yaitu Kotamadya Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Rejang Lebong. Tiga dari empat daerah Tingkat II tersebut berada di sepanjang pesisir, yaitu Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan dan Kota Bengkulu (Witrianto, 2013 dalam Arianti dan Cahyadinata, 2014).

Provinsi Bengkulu mengalami pemekaran wilayah mulai tahun 2003, dimana sekarang ada enam kabupaten baru (Daerah Otonomi Baru, DOB) sebagai hasil dari pemekaran tiga kabupaten sebelumnya, yaitu :

1. Kabupaten Mukomuko, pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara,
2. Kabupaten Seluma, pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan,
3. Kabupaten Kaur, pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan,
4. Kabupaten Kepahiang, pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong,
5. Kabupaten Lebong, pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong, dan
6. Kabupaten Bengkulu Tengah, pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara, pada tanggal 24 Juni 2008.

Dua dari tiga kabupaten yang mengalami pemekaran wilayah merupakan wilayah pesisir, yakni Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Selatan. Kota Bengkulu terletak di wilayah pesisir namun tidak mengalami pemekaran, sementara Kabupaten Rejang Lebong walaupun mengalami pemekaran, namun tidak berada di wilayah pesisir. Daerah-daerah Tingkat II yang terletak di wilayah pesisir Provinsi Bengkulu sebelum dan setelah pemekaran tahun 2003 dapat dilihat pada Tabel 1 (Arianti dan Cahyadinata, 2014).

Tabel 1. Daerah-daerah Pesisir di Provinsi Bengkulu Sebelum dan Setelah Pemekaran Wilayah

Sebelum Pemekaran		Setelah Pemekaran	
Daerah Induk (DI)	Daerah Otonomi Baru (DOB)	Daerah Mekar (DM)	
1. Kab. Bengkulu Utara	1. Kab. Mukomuko	1.	Kab. Bengkulu Utara
	2. Kab. Bengkulu Tengah	2.	Kab. Bengkulu Selatan
2. Kab. Bengkulu Selatan	3. Kab. Seluma	3.	Kab. Mukomuko
	4. Kab. Kaur	4.	Kab. Bengkulu Tengah
		5.	Kab. Seluma
		6.	Kab. Kaur

Berdasarkan Tabel 1, konsekuensi dari pemekaran itu adalah adanya Daerah Induk (DI), Daerah Otonomi Baru (DOB) dan Daerah Mekar (DM). DM merupakan gabungan antara DI dan DOB. DOB dibentuk agar wilayah tersebut dapat mengembangkan diri berdasarkan potensi lokal yang dimiliki sehingga kesenjangan ekonomi dapat dikurangi dan aspek-aspek kesejahteraan lain dapat dicapai. Tujuan pemekaran wilayah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di segala aspek, serta mempermudah masyarakat untuk memperoleh akses pelayanan berbagai bidang kehidupan, sehingga kesejahteraan di segala bidang pun diharapkan bisa diwujudkan. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu diangkat permasalahan bagaimanakah tingkat kesenjangan ekonomi antar daerah pesisir di Provinsi Bengkulu pada saat sebelum dan setelah pemekaran wilayah. Tujuan penelitian ini adalah untuk

menganalisis dampak pemekaran wilayah terhadap tingkat kesenjangan ekonomi antar daerah pesisir di Provinsi Bengkulu.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Bengkulu dari bulan Juni sampai Nopember 2013. Data yang digunakan adalah data-data sekunder dari BPS Provinsi Bengkulu, meliputi data PDRB atas Dasar Harga Konstan dan jumlah penduduk, baik data untuk masing-masing Daerah Induk (Kabupaten Bengkulu Utara (BU) dan Kabupaten Bengkulu Selatan (BS)), DOB yaitu Kabupaten Mukomuko (pemekaran Kabupaten BU) serta Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur (pemekaran Kabupaten BS), dan Daerah Mekar yang meliputi seluruh Daerah Induk dan DOB. Kabupaten Bengkulu Tengah yang merupakan DOB untuk Kabupaten BU tidak diteliti karena baru terbentuk tahun 2008. Data penelitian meliputi data sebelum pemekaran (tahun 1993-2000) dan setelah pemekaran (tahun 2004-2011). Data-data sekunder lainnya juga digunakan untuk mendukung pembahasan hasil penelitian ini.

Tingkat kesenjangan atau ekonomi antar daerah pesisir di Provinsi Bengkulu dianalisis dengan menggunakan Indeks Williamson (IW). IW dihitung dengan menggunakan rumus :

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y}$$

dimana, Y_i adalah Pendapatan/Kapita daerah pesisir (kabupaten) ke- i , Y adalah Pendapatan/Kapita total daerah pesisir, f_i adalah Jumlah penduduk daerah pesisir (kabupaten) ke- i , n adalah Jumlah penduduk total daerah pesisir

Besaran IW berkisar antara 0 sampai 1. Bila IW semakin mendekati 1 maka kesenjangan ekonomi antar daerah semakin tinggi. Bila IW semakin mendekati 0 maka kesenjangan ekonomi semakin rendah, dengan demikian kesejahteraan masyarakat antar daerah-daerah yang diteliti semakin merata (Kuncoro, 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pesisir di Provinsi Bengkulu

Salah satu indikator kinerja ekonomi yang digunakan untuk menganalisis dampak pemekaran wilayah adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan PDRB daerah pesisir sebelum pemekaran wilayah cenderung fluktuatif dengan rata-rata sebesar 4,05 %/tahun. Pada tahun 1997 dan 1998 pertumbuhan PDRB menurun menjadi negatif akibat krisis ekonomi. Setelah pemekaran wilayah

pertumbuhan PDRB lebih tinggi dibanding sebelum pemekaran wilayah dengan rata-rata sebesar 5,28 %/tahun.

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat mungkin disebabkan oleh pembangunan yang dilakukan di DOB. DOB mempunyai kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya untuk mengelola sumberdaya-sumberdaya yang dimiliki didukung oleh ketersediaan fasilitas infrastruktur

Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Daerah Pesisir Provinsi Bengkulu

Tingkat kesejahteraan ekonomi suatu daerah salah satunya dapat dilihat dari pendapatan masyarakat yang diukur dengan nilai PDRB/kapita. Daerah yang lebih sejahtera umumnya memiliki PDRB/kapita yang lebih tinggi. PDRB/kapita dihitung dengan cara membagikan nilai PDRB daerah dengan jumlah penduduk di daerah tersebut.

Daerah Tingkat II yang berada di wilayah pesisir di Provinsi Bengkulu dan kemudian mengalami pemekaran adalah Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Selatan. Dua daerah ini setelah pemekaran disebut sebagai Daerah Induk (DI). Pemekaran wilayah menyebabkan terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB). Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur terbentuk sebagai pemekaran Kabupaten Bengkulu Selatan, sementara Kabupaten Mukomuko merupakan DOB yang terbentuk dari pemekaran Kabupaten Bangkulu Utara. Daerah pesisir di Provinsi Bengkulu setelah proses pemekaran wilayah berkembang dari dua kabupaten menjadi lima kabupaten.

PDRB/Kapita daerah pesisir di Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada Tabel 2. Sementara pada Tabel 3 disajikan PDRB/Kapita daerah pesisir setelah dilakukannya pemekaran wilayah. Perbandingan rata-rata PDRB/Kapita daerah pesisir sebelum dan setelah pemekaran wilayah tertera dalam Tabel 4.

Rata-rata PDRB/kapita daerah pesisir saat sebelum pemekaran wilayah (tahun 1993-2000) adalah Rp 1.070.863,58 dan setelah pemekaran (tahun 2004-2011) adalah Rp 2.701.944,95. Rata-rata PDRB/kapita daerah pesisir baik sebelum maupun setelah pemekaran wilayah cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Namun pendapatan per kapita daerah pesisir ini masih sangat rendah dibanding pendapatan per kapita Provinsi Bengkulu yang mencapai Rp 5.100.000 pada tahun 2011. Hal ini terjadi karena daerah pesisir yang menjadi objek penelitian adalah daerah-daerah yang PDRB nya didominasi oleh sumbangan sektor primer seperti sektor pertanian yang bernilai rendah (Noviansa, 2013).

Tabel 2. PDRB/Kapita Daerah Pesisir di Provinsi Bengkulu Sebelum Pemekaran Wilayah

Tahun	PDRB/Kapita (Rp)	
	Kab. Bengkulu Utara	Kab. Bengkulu Selatan
1993	850.325,36	936.025,89
1994	948.653,00	1.457.788,00
1995	952.277,00	1.307.921,00
1996	972.086,00	1.244.262,00
1997	887.391,00	1.175.614,00
1998	904.222,00	1.136.725,00
1999	916.117,00	1.145.982,00
2000	969.478,00	1.328.950,00
Rata-rata	925.068,67	1.216.658,49

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, berbagai tahun publikasi.

Tabel 3. PDRB/Kapita Daerah Pesisir di Provinsi Bengkulu Setelah Pemekaran Wilayah

Tahun	PDRB/Kapita Daerah Pesisir (Rp)				
	Daerah Otonomi Baru (DOB)			Daerah Inti (DI)	
	Seluma	Kaur	Mukomuko	Bengkulu Utara	Bengkulu Selatan
2004	1.597.506,51	1.445.106,00	3.288.640,99	855.273,18	1.059.610,28
2005	1.672.842,39	1.821.633,55	3.338.016,85	2.749.959,92	3.180.761,22
2006	1.757.279,27	1.879.759,85	3.521.267,72	2.905.938,85	3.514.175,05
2007	1.874.883,22	1.848.001,86	3.520.102,46	3.000.414,86	3.580.701,58
2008	1.959.430,93	1.872.913,83	3.590.846,69	2.114.696,36	3.677.648,25
2009	2.043.103,15	1.878.926,07	3.667.805,88	3.028.304,93	3.765.591,33
2010	2.053.524,06	2.110.791,74	3.925.975,29	3.139.522,96	3.979.109,62
2011	2.137.168,78	2.350.573,11	3.857.198,85	3.277.777,38	4.178.694,20
Rerata	1.849.152,38	1.900.963,25	3.538.657,00	2.469.324,16	3.319.172,44
Rerata	2.412.777,51			2.972.004,11	

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, berbagai tahun publikasi.

Pertumbuhan PDRB/kapita sebelum pemekaran rata-rata hanya 4,46 %/tahun sementara setelah pemekaran wilayah peningkatannya sebesar 8,50 %/tahun. Saat sebelum pemekaran, nilai PDRB/kapita beserta nilai pertumbuhannya lebih rendah dibanding setelah pemekaran. Setelah pemekaran wilayah, pertumbuhan ekonomi menjadi sangat baik. Menurut

Darmawan dkk (2008) suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik jika angka pertumbuhannya antara 5 % sampai 6 %/tahun, sementara daerah pesisir Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan sebesar 8,5 %/tahun. Sebelum pemekaran laju pertumbuhan ekonomi kurang dari 5 % yakni hanya 4,46 %.

Tabel 4. Rata-rata PDRB/Kapita Daerah Pesisir Sebelum dan Setelah Pemekaran Wilayah (dalam Rp)

Sebelum Pemekaran Wilayah		Setelah Pemekaran Wilayah	
Tahun	Rata-rata PDRB/kapita	Tahun	Rata-rata PDRB/kapita
1994	893.175,63	2004	1.649.227,40
1994	1.203.220,50	2005	2.552.642,79
1995	1.130.099,00	2006	2.715.684,15
1996	1.108.174,00	2007	2.764.820,80
1997	1.031.502,50	2008	2.643.107,21
1998	1.020.473,50	2009	2.876.746,27
1999	1.031.049,50	2010	3.041.784,74
2000	1.149.214,00	2011	3.160.282,47
Rata-rata	1.070.863,58	Rata-rata	2.675.536,98

Sumber: Data Primer Diolah, 2013.

Kinerja ekonomi membaik setelah pemekaran dilakukan. Indikator pertumbuhan ekonomi seperti telah dijelaskan sebelumnya, setelah pemekaran wilayah, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik yakni sebesar 5,28 %/tahun dibanding sebelum pemekaran yang hanya sebesar 4,05 %/tahun. Demikian pula dengan indikator kesejahteraan PDRB/kapita yang saat sebelum pemekaran rata-rata pertumbuhannya 4,46 %/tahun meningkat pula setelah pemekaran wilayah menjadi rata-rata sebesar 8,50 %/tahun. Menurut Darmawan dkk (2008) suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik jika angka pertumbuhannya antara 5 % sampai 6 %/tahun.

Tampaknya pemekaran wilayah berdampak terhadap pembangunan ekonomi daerah. Menurut Khalid (2012) pasca terbentuknya DOB terdapat peluang yang besar bagi akselerasi pembangunan ekonomi di wilayah yang baru diberi status sebagai daerah otonom dengan pemerintahan sendiri. Bukan hanya infrastruktur pemerintahan yang terbangun, tetapi juga infrastruktur fisik yang menyertainya, seperti infrastruktur jalan, transportasi, komunikasi dan sejenisnya. Selain itu, kehadiran pemerintah DOB juga memungkinkan lahirnya infrastruktur kebijakan pembangunan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah otonom baru. Semua infrastruktur ini membuka peluang

yang lebih besar bagi wilayah hasil pemekaran untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi.

Namun perlu dilihat pula apakah kenaikan nilai PDRB/kapita beserta tingkat pertumbuhannya dapat benar-benar menunjukkan bahwa proses pemekaran wilayah juga berdampak kepada distribusi kesejahteraannya. Jika pendapatan yang tinggi serta pertumbuhan ekonomi yang baik tidak diikuti dengan kemerataannya, maka sebenarnya pembangunan belum dikatakan berhasil.

Kesenjangan Ekonomi antar Daerah Pesisir di Provinsi Bengkulu

Berdasarkan analisis tingkat kesenjangan ekonomi daerah pesisir Provinsi Bengkulu sebelum dan setelah pemekaran wilayah, diperoleh perkembangan nilai-nilai Indeks Williamson (IW) seperti tertera dalam Tabel 5.

Tabel 5. Tingkat Kesenjangan Ekonomi (Indeks Williamson (IW)) antar Daerah Pesisir Sebelum dan Setelah Pemekaran Wilayah

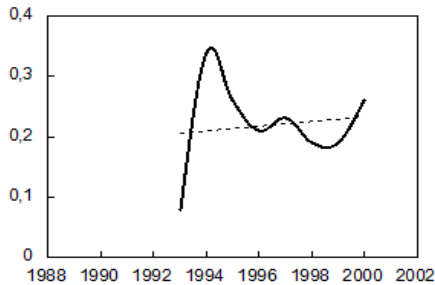
Sebelum Pemekaran		Setelah Pemekaran	
Tahun	Nilai IW	Tahun	Nilai IW
1993	0,08	2004	0,21
1994	0,34	2005	0,44
1995	0,26	2006	0,44
1996	0,21	2007	0,46
1997	0,23	2008	0,46
1998	0,19	2009	0,47
1999	0,19	2010	0,53
2000	0,26	2011	0,44
Rata-rata	0,22	Rata-rata	0,43

Sumber: Data Primer Diolah, 2013.

Analisis kesenjangan ekonomi antar daerah pesisir memberikan hasil bahwa sebelum pemekaran wilayah dilakukan, tingkat kesenjangan ekonomi cenderung cenderung rendah. Hal itu ditunjukkan oleh nilai rata-rata Indeks Williamson (IW) sebesar 0,22 yang mendekati angka 0 (nol). Kesenjangan ekonomi antar daerah pesisir justru meningkat menjadi rata-rata 0,43.

Perkembangan tingkat kesenjangan ekonomi daerah pesisir sebelum dan setelah pemekaran wilayah dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2. Tingkat kesenjangan ekonomi antar daerah pesisir sebelum pemekaran wilayah dengan rata-rata nilai IW sebesar 0,22. Perekonomian relatif terdistribusi lebih merata. Hal ini terjadi karena Kab. Bengkulu Utara (BU) dan Kab. Bengkulu Selatan (BS) telah memiliki tingkat kemampuan yang relatif sama dalam menjalankan roda perekonomian sejak dibentuk. Kedua kabupaten ini yang kemudian mengalami

pemekaran, sehingga setelah pemekaran wilayah dilakukan terdapat lima kabupaten yang memiliki PDRB per kapita yang nilainya jauh berbeda antara kabupaten satu dengan kabupaten lainnya (Tabel 3). Nilai IW rata-rata meningkat menjadi 0,43. Nilai IW cenderung meningkat lebih tajam dari tahun ke tahun dibanding sebelum pemekaran.



Gambar 1.
Perkembangan Indeks Williamson (IW)
Sebelum Pemekaran Wilayah



Gambar 2.
Perkembangan Indeks Williamson (IW)
Setelah Pemekaran Wilayah

Seperti telah diuraikan sebelumnya, setelah pemekaran dilakukan, terdapat dua DI (Kab. BU dan Kab. BS) dan tiga DOB (Kab. Mukomuko, Kab. Seluma da Kab. Kaur). Nilai PDRB/Kapita DI rata-rata sebesar Rp. 2.972.004,11 lebih tinggi dibanding DOB yang memiliki PDRB/Kapita rata-rata sebesar Rp 2.412.777,51. Kesenjangan ekonomi menjadi tinggi disebabkan oleh perbedaan kemampuan antara DI dan DOB dalam menggerakkan perekonomian. Penyebab kesenjangan ekonomi tersebut antara lain adalah pembagian sumberdaya-sumberdaya ekonomi yang tidak merata antara DI dan DOB wilayah pesisir Bengkulu, dimana DI sudah mulai didominasi oleh kawasan perdagangan, hotel dan restoran serta sumberdaya produktif. Sementara investasi oleh swasta dan program-program pembangunan di DOB belum berjalan dengan efektif.

Darmawan dkk (2008) menyatakan bahwa hasil evaluasi tentang dampak pemekaran wilayah tahun 2001 – 2007 menunjukkan DI memiliki tingkat PDRB per kapita yang lebih baik dibandingkan DOB. Ada beberapa alasan mengapa hal ini terjadi. Pertama, proses pembagian wilayah daerah mendorong DI melepas kecamatan-kecamatan yang merupakan daerah kantong-kantong kemiskinan. Indikasi melepas beban ini didukung pula oleh fakta, tidak adanya indikator tingkat kemiskinan pada persyaratan teknis pemekaran daerah. Kedua, DI memiliki potensi sumber daya yang lebih siap, baik pemerintahan, masyarakat maupun infrastrukturnya. Hal ini juga mempercepat pembangunan di DI yang setelah pemekaran, dimana mereka 'menikmati' jumlah penduduk yang lebih sedikit dengan kualitas sumberdaya ekonomi yang lebih baik.

Menurut Williamson (1965) *dalam* Indrayani (2010) terdapat hubungan antara disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi, dengan menggunakan data ekonomi negara yang sudah maju dan yang sedang berkembang. Ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lebih “matang” dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tampak adanya keseimbangan antar daerah dan disparitas berkurang dengan signifikan. Hal serupa terjadi pula pada daerah-daerah yang mengalami pemekaran

Temuan tentang kesenjangan ekonomi yang lebih tinggi justru terjadi setelah dilakukan pemekaran wilayah sejalan dengan hasil studi evaluasi dampak pemekaran wilayah yang dilakukan oleh Darmawan dkk (2008). Kesimpulan dari hasil studi evaluasi tersebut adalah pemekaran wilayah menghasilkan daerah-daerah yang masih harus berjuang keras untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakatnya.

SIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa setelah pemekaran wilayah tingkat kesenjangan ekonomi antar daerah pesisir di Provinsi Bengkulu lebih tinggi dengan nilai IW 0,43 dibandingkan dengan sebelum pemekaran wilayah yang memiliki nilai IW 0,22.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka perlu dilakukan pemerataan penyebaran sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia, prasarana penunjang antara DI dan DOB agar daerah-daerah tersebut berkembang dengan seimbang sehingga pemerataan kesejahteraan dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianti, Nyayu Neti dan Indra Cahyadinata. 2014. Kajian Dampak Pemekaran Wilayah terhadap Kinerja Ekonomi Daerah Pesisir di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Agriseip* 13(2) : 159-176.
- Darmawan, Nazara, S., Jackson, D., Ahmad, T. Dan Purwanto, D.A. 2008. Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerjasama dengan

- United Nations Development Programme (UNDP)*. <http://undp.or.id>. Diakses Tanggal 14 Januari 2016 Pukul 13.34 WIB.
- Indrayani, Agnes R.A. 2010. Disparitas Pendapatan Antar Wilayah di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi EFEKTIF* 1(2): 123 - 134. , Desember 2010.
- Khalid, T. M. 2012. Otonomi Daerah : Tujuan Pemekaran dan Penggabungan Daerah. <http://tengkumahesakhalid.blogspot.com>. Diakses Tanggal 29 Maret 2013 Pukul 20.30 WIB.
- Kuncoro, M. 2003. *Ekonomi Pembangunan*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Noviansa, Revi. 2013. *Sektor Pendapatan Regional, Kategori Potensi Daerah*. <http://kp2tprovbengkulu.info>. Diakses Tanggal 15 Nopember 2013 Pukul 09.15 WIB.